



Pembaruan Triwulanan

JANUARI-MARET 2022

Ringkasan

Papuans Behind Bars (PBB) mencatat bahwa ada empat belas (14) **tahanan politik baru** dalam periode Januari dan Maret 2022. Kami juga mencatat tambahan sebelas (11) orang yang masuk dalam **daftar pencarian orang (DPO) oleh polisi** dan dua (2) pembela HAM Indonesia yang telah **diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka** oleh polisi karena pencemaran nama baik dalam periode ini. Laporan ini memberikan gambaran umum tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan tahanan dan tersangka baru periode Januari-Maret 2022, serta mengabarkan perkembangan kasus-kasus tapol/napol tahun 2021. **Daftar Tapol** yang kami lampirkan memuat informasi tentang situasi aktual tahanan politik yang telah divonis dan sedang menjalani hukuman di berbagai lapas.

Masalah yang menjadi perhatian: Anak di bawah umur dalam tahanan, Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan, Akses kesehatan dalam tahanan, Pindahan tahanan politik dan akses bantuan hukum, Pengadilan yang bebas dan adil untuk kasus tahanan politik.

Latar belakang

Sesudah amandemen Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat (secara kolektif dikenal sebagai West Papua) pada Juli 2021, pemerintah Indonesia bermaksud untuk mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), melalui penerapan pengecualian tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 106/2021 tentang Pembentukan DOB di Provinsi Papua mengabaikan UU Pemerintah Daerah No. 23/2014 dengan mengabaikan persiapan yang diperlukan untuk pembentukan DOB dan persyaratan dasar dan administrasi lainnya.

Pengecualian dan target Jakarta dalam pembentukan provinsi baru pada tahun 2023 tidak memberikan ruang untuk konsultasi publik yang layak dan mengulangi cerita tentang proses penetapan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat yang sebelumnya. Ratusan orang telah melakukan demonstrasi di berbagai daerah di West Papua serta di provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang mengakibatkan penangkapan dan intimidasi terhadap pengunjuk rasa serta pembubaran paksa dan sewenang-wenang.

Ketidakpuasan terhadap pendekatan Jakarta ke Papua memunculkan lebih banyak gerakan akar rumput. Petisi Rakyat Papua atau PRP, sebuah gerakan yang kini memiliki 122 organisasi dalam jaringan solidaritasnya, diluncurkan pada 4 Juli 2020 dengan tujuan: menolak pemekaran,¹ menolak otonomi khusus, dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Sejak diluncurkan, PRP telah melakukan banyak aksi damai di Papua. Protes dan penangkapan terus berlangsung pada saat laporan ini ditulis dan akan terus berlangsung di bulan-bulan yang akan datang.

Pemerintah pusat terus menggelar lebih banyak operasi penegakan hukum pada 2022. Dua operasi baru - Operasi Damai Cartenz² dan Operasi Rasaka Cartenz³ - mulai diluncurkan pada awal tahun 2022. Menurut juru bicara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Operasi Damai Cartenz menggantikan Operasi Nemangkawi⁴ dan memiliki fokus operasi di lima kabupaten: Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Puncak, dan Intan Jaya.⁵ Terakhir, Operasi Rasaka Cartenz akan beroperasi di 24 kabupaten lain di luar lima kabupaten di atas.⁶ Peningkatan jumlah tahanan politik juga berasal dari meningkatnya konflik bersenjata di wilayah Papua. Misalnya, penembakan dan pembunuhan aparat keamanan Indonesia di Maybrat pada September 2021 dan baru-baru ini penembakan aparat keamanan Indonesia pada Januari 2022 juga di Maybrat. Terkait insiden-insiden penembakan tersebut, pihak berwenang mengintensifkan target penangkapan terhadap anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).⁷ KNPB adalah organisasi politik damai yang melakukan kampanye penentuan nasib sendiri melalui cara-cara demokratis.

Kasus baru

Enos Tipigau ditangkap bersama enam orang lainnya pada 5 Februari 2022 oleh satuan penegak hukum Operasi Damai Cartenz dan Polres Mimika. Menurut laporan polisi, Tipigau telah dimasukkan dalam daftar pencarian polisi karena diduga terlibat dalam beberapa kejahatan, termasuk: menembak seorang warga sipil atas nama Zainudin pada 15 Agustus 2020; penembakan Wakapolda Papua dan rombongannya pada 25 September 2020 di Bandara Sugapa; penembakan di Polsek Sugapa di Intan Jaya pada 30 September 2020; penembakan warga sipil atas nama Ramli pada 8 Februari 2021; penembakan di pos militer Sugapa pada Februari 2021; dan membakar sebuah toko pada Oktober 2021. Enos Tipigau tetap ditahan sementara polisi membebaskan enam orang yang ditangkap bersamanya. Menurut Kapolres Mimika, I Gusti Gde Era Adhinata, Enos Tipigau adalah anggota TPNPB di bawah komando Undius Kogoya di unit yang biasa beroperasi di kawasan Intan Jaya. Enos Tipigau saat ini ditahan di Polsek Mimika sementara polisi sedang melakukan penyelidikan atas tuduhan-tuduhan kejahatan yang dia lakukan.

Abraham Mate atau Bram ditangkap pada 21 Februari di Manokwari. Mate, seorang pendukung KNPB, telah masuk dalam DPO polisi sehubungan dengan dugaan keterlibatannya dalam serangan terhadap pos militer Kisor (lihat Sorong 6).

Irinus Telenggen dan Nias Wakerkwa ditangkap pada tanggal 23 dan 24 Februari dan didakwa dengan kepemilikan senjata ilegal dan menyebabkan cedera fisik pada petugas polisi di Puncak. Pengacara mereka dari LBH Talenta Keadilan Papua di Nabire (LBH TKPN) melaporkan bahwa mereka mendapat halangan dari otoritas (kepolisian) saat ingin bertemu dengan dua napol tersebut untuk menandatangani surat kuasa (hukum). Keduanya saat ini ditahan di Polres Nabire setelah dipindahkan dari Puncak.

Pada 25 Februari 2022, Polda Papua Barat membagikan surat perintah penggeledahan terhadap sebelas orang anggota KNPB Cabang Maybrat. Mereka adalah Arnoldus Kocu, Manuel Aimau, Chusme Altief, Sepnat Fatem, Zakarias Kamat, Rendy Fatem, Hamelus Assem, Vincen Frabuku, Thomas Assem, Libertus Assem, dan Wamen. Pencarian dipicu oleh insiden penembakan pada 20 Januari yang menargetkan personel militer Kodam XVIII Kasuari. Seorang tentara tewas dan dua terluka dalam kejadian tersebut.⁸

Pada 11 Maret 2022, Alfius Wenda ditangkap bersama 89 orang lainnya yang sedang berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, Indonesia. Polisi Indonesia membubarkan protes itu dan melakukan penangkapan. Semua peserta aksi dibebaskan kecuali Alfius Wenda yang masih ditahan karena dituduh melakukan pemukulan terhadap kepala Satuan Intelijen Polda Metro Jaya. Laporan juga mengatakan bahwa ada enam peserta unjuk rasa lainnya yang terluka oleh aksi polisi hari itu, tapi polisi membantah menggunakan kekerasan.⁹

Yanis Suhun dan Vetty Kobak ditangkap pada 20 Maret 2022 dalam sebuah aksi protes di Dekai Yahukimo pada 15 Maret 2022, yang mengakibatkan kerusakan antara pengunjung rasa dan polisi. Sepuluh orang ditembak polisi, dua di antaranya meninggal di tempat. Belum ada laporan tentang apa tuduhan terhadap kedua napol itu. Diyakini bahwa kedua pria itu adalah sopir dari mobil yang digunakan dalam aksi protes hari itu.

Bazoka Logo ditangkap pada 24 Maret 2022 di Jayapura bersama Buchtar Tabuni, Kibo Telenggen, Jekson Wakerkwa, Yohanis Wandikbo, Lawe Wandikbo dan Gilbert Kogoya. Mereka ditangkap karena diduga menyerang petugas polisi. Polisi mengatakan bahwa mereka melakukan kegiatan patroli rutin saat mendapat informasi bahwa ada pertemuan yang diselenggarakan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Polisi menuduh bahwa ketika aparat datang untuk menyelidiki lebih lanjut, aparat diserang oleh kelompok tersebut.

Pembaruan kasus yang sedang berlangsung

Gerakan West Papua Melawan

(Sedang diadili)

-Victor Yeimo-

Sidang praperadilan Victor Yeimo dibatalkan pada 27 Agustus 2021 dengan alasan kesehatannya yang buruk. Sidang pertamanya dimulai pada 20 Januari 2022 dengan agenda pembacaan dakwaan, tetapi kesehatan Yeimo tidak memadai untuk bisa hadir di pengadilan. Penuntut umum mendakwa Victor Yeimo melakukan makar [Pasal 106 juncto pasal 55 (1), dan Pasal 110 (1 dan 2)], dan menghasut untuk melakukan tindak pidana [Pasal 160 bersama pasal 55 (1)] dengan ancaman penjara hingga 20 tahun. Dia dituduh terlibat memobilisasi protes besar-besaran pada Agustus 2019 yang menyebabkan kerusakan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan properti pribadi.

Yeimo membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa hati nuraninya mendesak dia untuk berbicara menentang rasisme terhadap orang Papua, dan bahwa dia adalah salah satu di antara banyak tokoh masyarakat, termasuk Gubernur Papua, yang memberikan pidato di depan umum dalam protes besar-besaran tersebut. Gustaf Kawer, salah satu pengacara Victor Yeimo, khawatir tuduhan itu dibuat untuk mengkriminalisasi Yeimo, yang menghadiri rapat umum sebagai peserta dan diundang untuk berbicara.

Victor Yeimo muncul di pengadilan pada 21 Februari 2022, meskipun ada protes dari pengacara Yeimo bahwa ia masih perlu menjalani perawatan lebih lanjut karena mengidap tuberkulosis kronis. Penuntut umum meminta agar penahanan Yeimo dipulihkan sehingga dia akan ditempatkan di lapas Abepura. Namun pengacara Yeimo mempertanyakan kondisi sel tahanan yang buruk. Pada tanggal 25 Februari, pengacara Mr. Yeimo mengajukan eksepsi (keberatan) di pengadilan. Yeimo tidak hadir karena sakit. Majelis hakim kemudian mengeluarkan ketetapan tentang kelanjutan penangguhan penahanan karena terdakwa masih sakit. Artinya, waktu yang digunakan selama perawatan itu tidak boleh dihitung sebagai waktu tahanan.

Sidang dilanjutkan pada 25 Maret untuk pembacaan eksepsi. Sidang ditunda karena Yeimo masih sakit.

-Frans Wasini-

Frans Wasini, mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen), diburu polisi karena keterlibatannya dalam Gerakan Melawan 2019. Wasini ditangkap pada 20 Mei 2021, seminggu setelah Victor Yeimo ditangkap. Dia didakwa melakukan makar dan penghasutan dalam gerakan tersebut. Setelah hampir satu tahun ditahan, dia dibebaskan dari tahanan pada 17 Februari 2022 karena masa penahanannya habis. Persidangannya berlanjut pada 18 Februari dan dia didakwa dengan makar dan penghasutan. Namun, dalam persidangan pada tanggal 15 Maret, ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan makar tetapi bersalah atas tuduhan penghasutan.¹⁰ Dia telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, meskipun jaksa awalnya menuntut 10 tahun. Jaksa mengajukan banding atas putusan 18 Maret dan pada 30 Maret dilaporkan bahwa hakim sedang meninjau bukti banding dari jaksa.



Zode Hilapok di RS Dok 2 Jayapura, 27 April 2022

Jayapura 8

(Sedang diadili)

Delapan mahasiswa didakwa makar karena mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2021. Melvin Yobe, Melvin Wane, Devian Tekege, Ambrosius Elopere, Maksimus You, Yosep Matuan, Lius Uropmabin, dan Zode Hilapok. Mereka dijuluki 'Jayapura 8'.

Sidang praperadilan yang dijadwalkan bersalngsug pada 19 April 2022 ditunda karena kesehatan Melvin Yobe dan Zode Hilapok kurang baik. Yobe sudah menjalani pengobatan TBC sejak sebelum ditangkap, sedangkan Hilapok mengidap COVID-19. Pada 24 April, Zode Hilapok dirawat di rumah sakit Dok 2 Jayapura karena masalah kesehatan dan dinyatakan positif COVID-19. Sidang ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut karena para tahanan saat ini berada di bawah karantina COVID-19.

Arso 7

(Divonis)

Pada 28 Juli 2021, Aser Rumere, Kundrat Rumkorem, Abraham Rumkorem, Yukila Tabuni, Isak Usior, Septinus Rumere, dan Yanus Kogoya ditangkap di Arso Timur, dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara peringatan HUT TPNPB di Papua Nugini. Pada 21 April 2022, mereka didakwa melakukan makar dan dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, setelah dinyatakan bersalah. Semua menerima putusan dan akan dibebaskan pada Juni 2022.¹¹

Sorong 6

(Sedang diadili)

Amos Ky, Agustinus Yaam, Maikel Yaam, Maklon Same, RY, dan YW, adalah tahanan yang dikenal sebagai Sorong Enam, yang ditangkap setelah 'insiden Kisor', insiden penyerangan terhadap pos militer yang menewaskan empat tentara di Maybrat, Provinsi Papua Barat, September 2021. Keenamnya dituduh terlibat dalam serangan itu dan dipindahkan secara diam-diam dari Sorong (Papua Barat) ke Makassar (Sulawesi Selatan) pada Desember (lihat Pembaruan sebelumnya). Dua yang terakhir adalah anak di bawah umur yang identitasnya harus dilindungi.

Sejak awal, persidangan Sorong Enam diwarnai kejanggalan. Pada 30 Maret 2022 dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan lisan terhadap saksi-saksi yakni penyidik Polres Sorong Selatan yang diduga melakukan penyiksaan terhadap para tahanan waktu dalam tahanan polisi. Namun, tanpa pemberitahuan sebelumnya, hakim mengubah agenda pemeriksaan terhadap para terdakwa. Hakim bertanya kepada para terdakwa apakah mereka ingin mengubah pernyataan mereka sebelumnya. Tiga terdakwa, Maikel Yaam, Amos Ky, dan RY, setuju dan menjawab pertanyaan hakim dengan mengakui bersalah atas tuduhan terhadap mereka. Akibat pengakuan ketiga terdakwa tersebut, tiga penyidik Polres Sorong Selatan batal diperiksa hakim.

Perubahan cerita itu mengejutkan. Dalam agenda sidang-sidang sebelumnya, para terdakwa secara konsisten membantah tuduhan terhadap mereka dan mengatakan bahwa mereka telah disiksa saat menjalani diperiksa polisi.¹²

Masalah yang menjadi perhatian

Dalam laporan triwulanan sebelumnya, PBB melaporkan penangkapan empat anak sekolah, tiga di antaranya berusia 16 tahun atau lebih muda pada saat mereka ditangkap. Maklom Same (18) seorang siswa SMA, LK (15) siswa SMP, RY (16) siswa SMP, dan YW (16), ditangkap terkait penyerangan dan pembunuhan empat anggota TNI di Kabupaten Maybrat. Mereka, bersama dengan tersangka dewasa lainnya yang ditangkap karena insiden pembunuhan itu, dilaporkan disiksa saat berada dalam tahanan penyidik polisi dari Polres Sorong Selatan. Semuanya kini telah menjalani proses persidangan. LK divonis 8 tahun penjara, sementara tiga lainnya dipindahkan sejauh 868 mil (1.397 kilometer) dari Sorong ke Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, tempat mereka saat ini diadili.

PBB prihatin dengan keadaan anak di bawah umur ini dan masalah pengadilan yang adil (fair trial) bagi anak di bawah umur terutama di lokasi yang jauh dari keluarga mereka dan orang-orang yang dapat mereka andalkan. Misalnya, LK dipenjarakan di lapas dewasa, Lembaga Pemasyarakatan Sorong. MS, RY, dan YW, saat ini sedang menjalani sidang di Makassar bersama tiga terdakwa 'Sorong 6' lainnya. Meskipun mereka di bawah umur, identitas mereka tidak dirahasiakan sedangkan persidangan mereka dijalankan dalam proses pengadilan tertutup. Pengungkapan ketidakberesan proses persidangan baru-baru ini menimbulkan lebih banyak kekhawatiran. Tiga penyidik Polres Sorong Selatan, yang seharusnya hadir di persidangan di Makassar, mengunjungi tiga terdakwa dan meyakinkan mereka untuk mengubah pernyataan dengan janji akan dikembalikan ke Papua kalau mereka mengaku bersalah.

Secara lebih luas, kesehatan para tapol Papua menjadi sorotan. Karena kurangnya perlindungan terhadap para napol di sel tahanan, beberapa napol baru-baru ini dinyatakan positif COVID-19, beberapa dengan gejala yang sangat parah, seperti dalam kasus tahanan Jayapura 8.

Referensi

1. Pemekaran yang dimaksud adalah pembagian wilayah administrasi lebih lanjut sebagai bagian dari proses desentralisasi oleh pemerintah pusat di Indonesia. Proses tersebut menghasilkan pembentukan kabupaten yang lebih banyak dari yang telah ada dan menciptakan batas wilayah dan unit administrasi-administrasi baru.
2. Operasi Damai Cartenz dikerahkan pada Januari 2022 untuk menggantikan Operasi Nemangkawi dengan tujuan menggunakan pendekatan penegakan hukum yang lebih lunak terhadap konflik di Papua. Operasi tersebut dilengkapi dengan 1.925 personel gabungan polisi dan militer, yang terdiri dari 1.824 personel polisi dan 101 personel TNI. Dari kontingen polisi tersebut, 528 personel berasal dari Polda Papua, 1.296 personel dari Mabes Polri. Operasi Damai Cartenz menggantikan Operasi Nemangkawi yang dikerahkan pada 2019. CNN Indonesia, 'Hampir Seluruh Personel Operasi Damai Cartenz dari Luar Papua' 19 Januari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119040815-12-748350/hampir-seluruh-personel-operasi-damai-cartenz-dari-luar-papua>
3. Operasi Rasaka Cartenz dikerahkan pada 3 Februari hingga 31 Desember 2022. Ini adalah operasi teritorial yang dipimpin oleh Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) dan kesatuan polisi setempat yang mencakup semua wilayah lain di luar Operasi Damai Cartenz. Operasi ini berkekuatan 425 personel. L. Rahmawati, 'Ini perbedaan Operasi Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz Papua', 20 Januari 2022, Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/2654337/ini-perbedaan-operasi-damai-cartenz-dan-rasaka-cartenz-papua>
4. Operasi Nemangkawi dikerahkan pada 2019 sebagai tanggapan atas pembunuhan pekerja pembangunan jalan raya di wilayah Nduga pada Desember 2018. Tujuan utama satgas ini adalah mengejar kelompok bersenjata Papua Barat yang menjadi pelaku pembunuhan. Sepanjang 2019, 2020, dan 2021, Satgas Nemangkawi juga turut serta dalam penangkapan warga sipil dan aktivis politik yang melakukan aksi-aksi protes. Operasi Nemangkawi selesai pada 25 Januari 2022 dan digantikan dengan Operasi Damai Cartenz. Laily R dan Rahmad Nasution, 'Masa operasional Satgas Nemangkawi diperpanjang hingga 25 Januari', 3 Januari 2022. <https://en.antaraneews.com/news/207601/nemangkawi-task-forces-operational-period-extended-till-jan-25>
5. L. Rahmawati, 'Ini perbedaan Operasi Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz Papua', 20 January 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2654337/ini-perbedaan-operasi-damai-cartenz-dan-rasaka-cartenz-papua>
6. L. Rahmawati, 'Ini perbedaan Operasi Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz Papua', 20 January 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2654337/ini-perbedaan-operasi-damai-cartenz-dan-rasaka-cartenz-papua>
7. KNPB didirikan pada tahun 2008. Organisasi ini bemarkas di Jayapura dan memiliki kantor di seluruh wilayah West Papua. Tujuan utama dari organisasi non-kekerasan ini adalah untuk mencapai pemenuhan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua melalui referendum. <https://suarapapua.com/2018/10/30/declaration-of-congress-ii-of-west-papua-national-committee-knpb/>
8. Tribun-Papua, '11 Foto DPO Terduga Pelaku Penembakan Prajurit TNI di Maybrat Disebar di Pasar hingga Rumah Warga', 26 February 2022. <https://papua.tribunnews.com/2022/02/26/11-foto-dpo-terduga-pelaku-penembakan-prajurit-tni-di-maybrat-disebar-di-pasar-hingga-rumah-warga>
9. CNN Indonesia, 'Demo Papua Berujung Ricuh di Dekat Istana, Total 90 Orang Ditangkap', 19 January 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220311184249-12-770111/demo-papua-berujung-ricuh-di-dekat-istana-total-90-orang-ditangkap>
10. H. Yeimo, 'Fransis Wasini tidak terbukti lakukan makar', 16 March 2022. <https://jubi.id/tanah-papua/2022/lagi-mahasiswa-yang-terlibat-demo-anti-rasisme-papua-divonis-makar/>
11. H. Yeimo, 'Hadiri upacara HUT TPNPB, 7 terdakwa makar dihukum 10 bulan penjara', 21 April 2022. <https://jubi.id/tanah-papua/2022/hadiri-upacara-hut-tpnpb-7-terdakwa-makar-dihukum-10-bulan-penjara/>
12. Maikel sudah tiga kali membantah terlibat: saat menjadi saksi mahkota dalam persidangan LK—anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang diadili dalam kasus yang sama namun sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Sorong—pada 25 November lalu. 2021; dalam acara pembacaan dakwaan perkara (nomor 70/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 2 Februari 2022); dan kembali menjadi saksi mahkota perkara nomor 69/Pid.B/2022/PN Mks, yang diadili MS, YW, dan AY. Baik Amos Ky dan Ry membantah tuduhan terhadap mereka di bawah sumpah pada 2 Februari 2022 dan ketika mereka menjadi saksi mahkota selama persidangan 24 Maret.

PAPUANS BEHIND BARS

Papuans Behind Bars, diluncurkan pada April 2013, adalah sumber online yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mengkampanyekan pembebasan tahanan politik West Papua. Banyak tahanan politik mengalami penangkapan sewenang-wenang, kekerasan, pelecehan, penyiksaan, pengadilan yang tidak adil, intimidasi dan penelantaran. Beberapa organisasi terlibat dalam penyusunan dokumentasi tapol Papua. Situs tersebut saat ini dikelola oleh TAPOL. Kunjungi situs Papuans Behind Bars dan TAPOL untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

Silakan juga berlangganan milis kami untuk tetap mendapatkan informasi terbaru.

<http://event.papuansbehindbars.org>

www.papuansbehindbars.org



@papuanprisoners



Papuans Behind Bars